



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini memuat rencana Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan Tahun 2025 serta memuat target dan sasaran yang akan di capai pada tahun 2025 yang didasarkan pada sasaran dan indikator yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Periode 2025-2026. Penyusunan Renja Tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ini di susun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung. Kami menyadari dokumen ini masih belum sempurna, masukan dan koreksi sangat diharapkan guna perbaikan-perbaikan diwaktu yang akan datang.

Demikian Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2025 ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, Desember 2024



KEPALA DINAS,

Drs. SAMSURIJAL, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670418 199203 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
II. HASIL EVALUASI RENJA	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun lalu dan Capaian RENJA Terhadap RENSTRA	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.3 Isu-Isu Penting Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	33
2.4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD 2025	34
2.5 Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan	35
III. TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2025	43
3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	43
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah	45
IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	47
4.1 Program dan Kegiatan	47
V. PENUTUP	56
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II.....	7
Tabel 2.1.2. Cascading Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah sampai pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	8
Tabel 2.1.3. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Antara RENJA Perubahan Dengan Renstra 2019-2024	14
Tabel 2.1.4. Kesesuaian Program dan Kegiatan Antara RENJA Perubahan 2024 Perangkat Daerah Dengan APBD Murni Tahun 2024.....	17
Tabel 2.1.5. Persentase Capaian Anggaran Program Renja Tahun 2024 s/d Triwulan II.....	19
Tabel 2.1.4. Persentase Capaian Kinerja Program Renja Tahun 2024 s/d Triwulan II	20
Tabel 2.2.1. Rekapitulasi Data Koperasi Provinsi Lampung 2013-2023.....	30
Tabel 2.2.2. Data Koperasi Provinsi Lampung Berdasarkan Jenis Tahun 2023.....	31
Tabel 2.2.3. Jumlah Usaha Menurut Skala Usaha dan Kabupaten Provinsi Lampung Tahun 2023 (Berdasarkan Jumlah Penjualan PP NO.7 Tahun 2021)	31
Tabel 2.2.4. Data UMKM Unggulan di Provinsi Lampung	32
Tabel 2.2.5. Tabel Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025.....	36
Tabel 3.2.1. Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2025	46

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Seiring dengan komitmen Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung untuk melakukan reformasi birokrasi, akan menjadi tonggak baru bagi pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Komitmen ini merupakan bagian penting untuk meningkatkan kinerja, yang sekaligus sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi rakyat. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal atau krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Lampung ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 1 (satu) tahun. Penyusunan RENJA ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Daerah berakhir pada Tahun 2024.

Penyusunan RENJA ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di tahun 2025 serta telah diselaraskan dengan Tema Pembangunan Nasional 2025 dan Prioritas Pembangunan Nasional 2025 serta Tema Pembangunan dan Provinsi Lampung 2025 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung 2025.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 499);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung ;

25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung No 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA Tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah perencanaan, kebijakan dan program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan RENJA Tahun 2025 ini adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan di tahun 2025 yang sejalan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1.4.1 BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

1.4.2 BAB II HASIL EVALUASI RENJA

Bab ini memuat informasi tentang Evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun sebelumnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

1.4.3 BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat analisis kebijakan nasional dan provinsi, sasaran dan tujuan RENJA perangkat daerah Tahun 2025

1.4.4 BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2025.

1.4.5 BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan RENJA Dinas Koperasi dan UKM, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta catatan dan harapan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

II. HASIL EVALUASI RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun lalu dan Capaian RENJA Terhadap RENSTRA

❖ Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah (IKU) Daerah Tahun 2024 Triwulan II

Dibawah ini adalah realisasi capaian indikator kinerja utama kepala perangkat daerah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 Triwulan II

Tabel 2.1.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (6/5* 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	1 Persentase Koperasi Yang Berkualitas	36,18	18,19 %	50,28 %
		1. Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	1 Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	5,71	4,31 %	75,43%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran RENSTRA / IKU Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sudah memenuhi harapan dimana dari ke 2 indikator yaitu Persentase Koperasi Yang Berkualitas dari target 36,18 persen yang ditargetkan di tahun 2024 tercapai 18,19 persen atau dengan tingkat capaian sebesar 50,28 persen. Untuk indikator yang kedua yaitu Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi) dari target sebesar 5,71 persen terealisasi 4,31 persen atau sebesar 75,43 persen. Hal ini sudah sangat baik dan sudah pada jalurnya mengingat ini masih periode awal pelaksanaan kegiatan dimana masih banyak kegiatan yang belum dapat dilaksanakan. Pencapaian ini

tentunya tidak terlepas dari peran semua pihak yang telah bekerja keras dalam membina dan membangun koperasi dan umkm yang ada di Provinsi Lampung.

❖ **Cascading Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah sampai pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Tabel 2.1.2. Cascading Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah sampai pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	SASARAN (IKU)		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Fasilitas Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Kelompok Koperasi yang Mengurus Izin simpan pinjam	Persentase Koperasi Yang Diberi Fasilitas Pengurusan Izin Usaha Simpan Pinjam	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam
						Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Izin Pembentukan Koperasi dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasi	Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Kantor Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya Koperasi Yang Menerapkan Peraturan Perkoperasian Yang Sesuai Ketentuan	Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya tatakelola koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan pengautan tata kelola kelembagaan koperasi

NO	SASARAN (IKU)		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	an Peraturan Perundang-Undangan	Undangan			
						Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Koperasi Simpan Pinjam Yang Menerapkan Peraturan Perkoperasian Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Meningkatnya Kepatuhan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
			Program Penilaian Kesehatan Ksp/Us Koperasi	Meningkatnya Koperasi Yang Berkategori Sehat	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Kesehatan KSP/USP	Persentase KSP/USP Yang Dinilai Kesehatan	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Terukur nya Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Pengetahuan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi Yang Meningkatkan Kompetensi dan Pengetahuannya	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan dan	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya	Meningkatnya Perlindungan Dan Skala Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar,	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki

NO	SASARAN (IKU)		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			i	Koperasi	Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten /Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	i	an Usaha	Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatkan Daya Saing Umkm Dan Menumbuhkembangkan Kewirausahaan	Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan	Menumbuhkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
			Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Pengembangan Usaha Bagi UMKM	Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan dan Kelembagaan dan Usaha	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Meningkatkannya Skala Usaha Umkm	Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi

NO	SASARAN (IKU)		NAMA PROGRAM	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan UKM	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di OPD	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Di OPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			

NO	SASARAN (IKU)		NAMA PROGRAM	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
									Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
									Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
									Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

NO	SASARAN (IKU)		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Tersedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan
									Penyediaan Bahan Material	Tersedia Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan	Tersedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan

NO	SASARAN (IKU)		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									n Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajaknya
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi

❖ **Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan antara Renja Perubahan 2024 dengan Renstra 2019-2024**

Dari tabel 2.1.3 dibawah ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2024, terdapat 4 sub kegiatan yang tidak ada di Renja Perubahan tahun 2024 tetapi sub kegiatan tersebut ada pada Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran yang ada sehingga sub kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Berikut ini adalah rinciannya :

Tabel 2.1.3. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan antara Renja Perubahan 2024 dengan Renstra 2019-2024

KODE REK	URUSAN BIDANG	RENSTRA	RENJA PERUBAHAN	KET
2.	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR			
2. 17.	BIDANG KOPERASI DAN UKM			

KODE REK						URUSAN BIDANG	RENSTRA	RENJA PERUBAHAN	KET
2.	17.	01.				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√	
2.	17.	01.	1.	01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	01.	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	01.	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	03.	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	03.	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	05.	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	√	X	
2.	17.	01.	1.	05.	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	√	X	
2.	17.	01.	1.	05.	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	√	X	
2.	17.	01.	1.	06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	√	X	
2.	17.	01.	1.	06.	07	Penyediaan Bahan Material	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	X	
2.	17.	01.	1.	07.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	X	
2.	17.	01.	1.	08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	08.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	
2.	17.	01.	1.	08.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	√	√	
2.	17.	02.				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	√	√	
2.	17.	02.	1.	01.		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	02.	1.	01.	01.	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	

KODE REK					URUSAN BIDANG	RENSTRA	RENJA PERUBAHAN	KET
2.	17.	02.	1.	02.		√	√	
2.	17.	02.	1.	02.	01.	√	√	
2.	17.	03.				√	√	
2.	17.	03.	1.	01.		√	√	
2.	17.	03.	1.	01.	03.	√	√	
2.	17.	03.	1.	02.		√	√	
2.	17.	03.	1.	02.	02.	√	√	
2.	17.	04.				√	√	
2.	17.	04.	1.	01.		√	√	
2.	17.	04.	1.	01.	03.	√	√	
2.	17.	05.				√	√	
2.	17.	05.	1.	01.		√	√	
2.	17.	05.	1.	01.	01.	√	√	
2.	17.	06.				√	√	
2.	17.	06.	1.	01.		√	√	
2.	17.	06.	1.	01.	02.	√	√	
2.	17.	07.				√	√	
2.	17.	07.	1.	01.		√	√	
2.	17.	07.	1.	01.	01.	√	√	
2.	17.	07.	1.	01.	02.	√	√	
2.	17.	08.				√	√	
2.	17.	08.	1.	01.		√	√	

KODE REK						URUSAN BIDANG	RENSTRA	RENJA PERUBAHAN	KET
2.	17.	08.	1.	01.	01.	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	√	√	

❖ **Kesesuaian Program dan Kegiatan Antara RENJA Perubahan 2024 Perangkat Daerah Dengan APBD Murni Tahun 2024**

Dibawah ini adalah tabel perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung antara RENJA Perubahan 2024 dengan APBD Murni Tahun 2024. Dari tabel 2.1.4 dibawah dapat dilihat bahwa pada Renja Perubahan tahun 2024, terdapat 2 kegiatan dan 2 sub sub kegiatan yang tidak ada di APBD murni tahun 2024. Hal ini terjadi karena adanya optimlisisasi anggaran yang ada sehingga kegiatan dan sub kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Berikut adalah rinciannya :

Tabel 2.1.4. Kesesuaian Program dan Kegiatan Antara RENJA Perubahan 2024 Perangkat Daerah Dengan APBD Murni Tahun 2024

KODE REK						URUSAN BIDANG	APBD MURNI	RENJA PERUBAHAN	KET
2.						URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR			
2.	17.					BIDANG KOPERASI DAN UKM			
2.	17.	01.				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√	
2.	17.	01.	1.	01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	01.	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	01.	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	03.	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	03.	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√	X	
2.	17.	01.	1.	05.	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	√	X	
2.	17.	01.	1.	06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	07	Penyediaan Bahan Material	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	X	

KODE REK						URUSAN BIDANG	APBD MURNI	RENJA PERUBAHAN	KET
2.	17.	01.	1.	07.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	X	
2.	17.	01.	1.	08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	08.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	
2.	17.	01.	1.	08.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	√	√	
2.	17.	02.				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	√	√	
2.	17.	02.	1.	01.		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	02.	1.	01.	01.	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	02.	1.	02.		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	02.	1.	02.	01.	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	03.				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	√	√	
2.	17.	03.	1.	01.		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	03.	1.	01.	03.	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan	√	√	
2.	17.	03.	1.	02.		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	03.	1.	02.	02.	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	04.				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	√	√	
2.	17.	04.	1.	01.		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	04.	1.	01.	03.	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	√	√	
2.	17.	05.				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	√	√	
2.	17.	05.	1.	01.		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	05.	1.	01.	01.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	√	√	
2.	17.	06.				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	√	√	

KODE REK					URUSAN BIDANG	APBD MURNI	RENJA PERUBAHAN	KET
					PERLINDUNGAN KOPERASI			
2.	17.	06.	1.	01.		√	√	
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
2.	17.	06.	1.	01.	02.	√	√	
					Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha			
2.	17.	07.				√	√	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
2.	17.	07.	1.	01.		√	√	
					Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			
2.	17.	07.	1.	01.	01.	√	√	
					Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			
2.	17.	07.	1.	01.	02.	√	√	
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan			
2.	17.	08.				√	√	
					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
2.	17.	08.	1.	01.		√	√	
					Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			
2.	17.	08.	1.	01.	01.	√	√	
					Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi			

❖ **Realisasi Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024**

Dibawah ini adalah tabel persentase rata-rata capaian kinerja perprogram tahun 2024 s/d triwulan II. Persentase rata-rata capaian kinerja ini dihitung dengan membandingkan target kinerja baik fisik maupun keuangan kegiatan tahun 2024 triwulan II dengan realisasi kinerja fisik maupun keuangan kegiatan di tahun 2024 triwulan II dikali 100 persen. Berikut adalah tabel rata-rata pencapaian kinerja program di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 triwulan II.

Tabel 2.1.5. Persentase Capaian Anggaran Program Renja Tahun 2024 s/d Triwulan II

NO	PROGRAM	TARGET (PERSEN)	REALISASI (PERSEN)	TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	$5=4/3*100$
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	39,41	39,41
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100	6,90	6,90
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	100	31,82	31,82
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100	0	0

NO	PROGRAM	TARGET (PERSEN)	REALISASI (PERSEN)	TINGKAT CAPAIAN
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	100	0	0
6	Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	100	12,54	12,54
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	100	44,05	44,05
8	Program Pengembangan UMKM	100	10,02	10,02
	RATA-RATA JUMLAH	100	27,35	27,35

Dari 8 Program yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, capaian rata-rata realisasi anggaran sangat rendah yaitu hanya 27,35 persen. Realisasi keuangan tertinggi terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 39,41 persen dan terendah ada pada Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar 0 persen

Tabel 2.1.5. Persentase Capaian Kinerja Program Renja Tahun 2024 s/d Triwulan II

NO	PROGRAM	TARGET (PERSEN)	REALISASI (PERSEN)	TINGKAT CAPAIAN (PERSEN)
1	2	3	4	$5=4/3*100$
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	50,00	50,00
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	46,70	37,79	80,92
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	47,17	36,96	78,35
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	78,57	61,63	78,44
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	26,55	12,40	46,70
6	Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	23,58	11,04	46,82
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	0,5	0,28	56,00
8	Program Pengembangan UMKM	10,91	7,09	64,99
	RATA-RATA JUMLAH			62,77

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa capaian kinerja program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 triwulan II sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan rata-rata sebesar 62,77 persen dengan capaian terendah ada pada Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi sebesar 46,82 persen sedangkan capaian tertinggi ada pada Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam sebesar 80,92 persen. Adapun realisasi capaian kinerja

kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada uraian berikut (rincian terlampir).

➤ **Program Penunjang (1 program) terdiri dari :**

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 12.532.662.623,62 terealisasi sebesar Rp. 4.938.744.409,00 terdiri dari 8 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 173.969.000,00 terealisasi sebesar 6,78 persen dengan Indikatornya adalah Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100 Persen terealisasi sebesar 50 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 140.000.000,00 terealisasi sebesar 3,86 persen dengan indikatornya jumlah dokumen perencanaan sebanyak 10 dokumen terealisasi sebesar 60 persen
 - b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 33.969.000,00 terealisasi sebesar 18,81 persen dengan indikatornya jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 11 laporan terealisasi sebesar 63,64 persen
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 10.018.564.632,00 terealisasi sebesar 44,02 persen dengan Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 50 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 9.943.564.532,00 terealisasi sebesar 44,30 persen dengan indikatornya jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 75 orang/bulan dan terealisasi sebanyak 52,05 persen
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp. 30.000.000,00 terealisasi sebesar 5 persen dengan indikatornya Jumlah Dokumen Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 36 dokumen terealisasi sebesar 50 persen

- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp. 15.000.000,00 terealisasi sebesar 10,73 persen dengan indikatornya Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan terealisasi sebesar 50 persen
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp. 30.000.000,00 terealisasi sebesar 5,33 persen dengan indikatornya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 17 laporan terealisasi sebesar 47,06 persen
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp. 45.000.000,00 terealisasi sebesar 4,03 persen dengan Indikatornya adalah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target 100 persen terealisasi sebesar 50 persen dengan Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 20.000.000,00 terealisasi sebesar 4,70 persen dengan indikatornya Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan terealisasi sebesar 50 persen
 - b) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 25.000.000,00 terealisasi sebesar 3,50 persen dengan indikatornya Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan terealisasi sebesar 50 persen
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 22.332.000,00. terealisasi sebesar 0 persen dengan Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 0 persen dengan Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 22.332.000,00. terealisasi sebesar 0 persen dengan indikatornya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 2 orang terealisasi sebesar 0 persen
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 650.186.791,62,00. terealisasi sebesar 21,07 persen dengan Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebanyak 100 persen. terealisasi sebesar 50 persen dengan Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 16.310.400,00 terealisasi sebesar 67,44 persen dengan indikatornya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket terealisasi sebesar 50 persen
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 11.239.800,00 terealisasi sebesar 44,48 persen dengan indikatornya Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 1 paket terealisasi sebesar 50 persen
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 16.526.991,62,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan indikatornya Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 1 paket terealisasi sebesar 50 persen
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material Rp. 122.449.600,00 terealisasi sebesar 47,04 persen dengan indikatornya Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan sebanyak 2 paket terealisasi sebesar 50 persen
- e) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Rp. 46.080.000,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan indikatornya Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 12 laporan terealisasi sebesar 50 persen
- f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 437.580.000,00 terealisasi sebesar 14,48 persen dengan

indikatornya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan terealisasi sebesar 50 persen

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 407.454.300,00. terealisasi sebesar 0 persen dengan indikatornya adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen terealisasi sebesar 0 persen dengan Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 407.454.300,00. terealisasi sebesar 0 persen dengan indikatornya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sebanyak 47 unit terealisasi sebesar 0 persen
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 755.490.000,00 terealisasi sebesar 39,89 persen dengan indikatornya adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen terealisasi sebesar 50 persen dengan Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 216.000.000,00 terealisasi sebesar 35,30 persen dengan indikatornya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan terealisasi sebesar 50 persen
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 539.490.000,00 terealisasi sebesar 41,65 persen dengan indikatornya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan terealisasi sebesar 50 persen
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 459.666.000,00 terealisasi sebesar 16,75 persen dengan indikatornya adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen terealisasi sebesar 50 persen dengan Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 205.476.000,00 terealisasi sebesar 7,30 persen dengan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 1 unit terealisasi sebesar 50 persen
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 215.990.000,00 terealisasi sebesar 28,71 persen dengan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 9 unit terealisasi sebesar 55,56 persen
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 16.660.000,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan indikatornya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 47 unit terealisasi sebesar 0 persen
- d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 21.540.000,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan indikatornya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit terealisasi sebesar 0 persen

➤ **Program Utama (7 Program) terdiri dari :**

II. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 365.988.000,00 terealisasi sebesar 6,90 persen terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

- 1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 165.988.000,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan indikator Persentase Kelompok/Koperasi Yang Diberi Penyuluhan Kelembagaan dan Izin Usaha Koperasi sebesar 100 persen terealisasi sebesar 0 persen dengan sub kegiatan yaitu :
 - a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam

1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 165.988.000,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam sebanyak 20 unit usaha terealisasi sebesar 0 persen

2. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar 12,63 persen dengan indikator kegiatannya adalah Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya sebesar 100 persen terealisasi sebesar 50 persen dengan sub kegiatannya yaitu :

a) Sub kegiatan Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar 12,63 persen dengan dengan indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 16 unit usaha terealisasi sebesar 68,75 persen

III. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 188.528.000,00 terealisasi sebesar 31,82 persen terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 113.528.000,00 terealisasi sebesar 52,84 dengan dengan indikator kegiatannya Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 50 persen dengan Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

- a) Sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Rp. 113.528.000,00 terealisasi sebesar 52,84 persen dengan indikatornya yaitu Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi sebanyak 30 unit usaha terealisasi sebesar 50 persen
2. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 75.000.000,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan dengan indikator kegiatannya Persentase Koperasi Ksp Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 0 persen dengan Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
 - a) Sub kegiatan Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Rp. 75.000.000,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan indikatornya yaitu Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan sebanyak 30 unit usaha terealisasi sebesar 0 persen

IV. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Rp. 175.000.000,00 terealisasi sebesar 0 persen terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 175.000.000,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan indikatornya adalah Persentase KSP/USP Yang Dinilai Kesehatannya sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 0 persen dengan sub kegiatan yaitu :
 - a) Sub kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Rp. 175.000.000,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan indikator sub kegiatan Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan sebanyak 30 unit usaha terealisasi sebesar 0 persen

V. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Rp. 5.191.677.000,00 terealisasi sebesar 0 persen Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan Yaitu :

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 5.191.677.000,00 terealisasi sebesar 0 persen indikatornya adalah Persentase SDM Koperasi Yang Meningkatkan Kompetensi dan Pengetahuannya sebesar 100 persen terealisasi sebesar 50 persen
 - a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp. 5.191.677.000,00 terealisasi sebesar 0 persen indikatornya adalah Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian sebanyak 722 orang terealisasi sebesar 0 persen

VI. Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Rp. 318.866.000,00 terealisasi sebesar 12,54 persen terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 318.866.000,00 terealisasi sebesar 3,69 persen indikator kegiatannya adalah Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 50 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Rp. 318.866.000,00 terealisasi sebesar 12,54 persen indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha sebanyak 35 unit usaha terealisasi sebesar 28,57 persen

VII. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Rp. 1.014.955.000,00 terealisasi sebesar 44,05 persen terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Rp. 1.014.955.000,00 terealisasi sebesar 44,05 persen indikator kegiatannya adalah Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 50 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Rp. 899.995.000,00 terealisasi sebesar 49,68 persen indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan dengan target 35 unit usaha terealisasi sebesar 42,86 persen
- b) Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Rp. 115.000.000,00 terealisasi sebesar 0 persen indikatornya Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan sebanyak 30 orang terealisasi sebesar 0 persen

VIII. Program Pengembangan UMKM Rp. 575.000.000,00 terealisasi sebesar 10,02 persen terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Rp. 575.000.000,00 terealisasi sebesar 10,02 persen indikator kegiatannya adalah Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 50 persen. Sub kegiatannya sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi Rp. 575.000.000,00 terealisasi sebesar 10,02 persen dengan indikator sub kegiatannya Jumlah Unit

Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi sebanyak 90 unit usaha terealisasi sebesar 33,33 persen

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2.1. Rekapitulasi Data Koperasi Provinsi Lampung 2013-2023

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Koperasi (unit)	4.751	4.932	5.099	5.325	5.340	5.341	5.423	5.653	5.862	6.005	6.101
Jumlah Anggota (orang)	412.617	683.523	586.937	887.537	681.026	772.968	455.374	2.273.853	658.667	947.645	2.488.290
Jumlah Koperasi Aktif (unit)	1.940	2.095	2.246	3.121	2.471	2.476	2.016	2.087	2.282	2.426	2.263
Jumlah Koperasi RAT (unit)	370	548	583	791	643	673	5.99	748	734	791	800

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Koperasi Aktif di Provinsi Lampung baik koperasi yang menjadi kewenangan Nasional, Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung mengalami peningkatan sejak tahun 2013, dari semula 1.940 unit koperasi menjadi 3.121 unit koperasi aktif pada tahun 2016 atau 58,6 % dari total unit koperasi di Provinsi Lampung. Akan tetapi pada tahun 2020 Jumlah Koperasi aktif mengalami penurunan menjadi 2.087 unit. Pada tahun 2023 koperasi aktif kembali meningkat menjadi meningkat menjadi 2.426 unit.

Berdasarkan jenisnya koperasi di Provinsi Lampung masih didominasi oleh koperasi konsumen dimana sebesar 47,96 persen atau 2.926 unit Koperasi di Provinsi Lampung merupakan Koperasi yang anggotanya merupakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli barang konsumsi. Sedangkan koperasi paling sedikit yaitu koperasi sektor jasa sebanyak 3,09 persen atau 189 unit koperasi. Meskipun jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan jenis koperasi lainnya, unit koperasi Jasa di Provinsi Lampung mulai berkembang. Seiring kemajuan sektor Pariwisata di Provinsi Lampung, koperasi akan terus didorong untuk lebih berperan dalam pengembangan pariwisata terutama pada *community*

based tourism seperti desa wisata dan agro/ekowisata. Data koperasi berdasarkan jenisnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2.2. Data Koperasi Provinsi Lampung Berdasarkan Jenis Tahun 2023

NO	JENIS KOPERASI	JUMLAH	AKTIF	TIDAK AKTIF
1.	Produsen	1.956	500	1.456
2.	Pemasaran	118	57	61
3.	Konsumen	2.926	1.108	1.818
4.	Jasa	189	115	74
5.	Simpan Pinjam	912	483	429
	Jumlah	6.101	2.263	3.838

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa koperasi aktif di Provinsi Lampung jenis usaha yang paling dominan adalah koperasi konsumen, disusul oleh simpan pinjam lalu produsen dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 2.488.290 orang pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung bersama Kementerian Koperasi dan UKM RI yang bekerjasama dengan BPS melakukan pendataan secara menyeluruh kepada para pelaku usaha di Provinsi Lampung dan menghasilkan sebuah data tunggal UMKM di Provinsi Lampung. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas data khususnya data UMKM di Provinsi Lampung. Berikut ini adalah tabel jumlah UMKM di Provinsi Lampung tahun 2023 berdasarkan Sistem Data Tunggal Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Tabel 2.2.3. Jumlah Usaha Menurut Skala Usaha dan Kabupaten Provinsi Lampung Tahun 2023 (Berdasarkan Jumlah Penjualan PP NO.7 Tahun 2021)

No	Kabupaten	Skala Usaha			Jumlah
		Mikro (<2M)	Kecil (2-15M)	Menengah (15-50M)	
1	KAB. LAMPUNG BARAT	20,308.00	187.00	26.00	20,521.00
2	KAB. TANGGAMUS	27,798.00	2.00	1.00	27,801.00
3	KAB. LAMPUNG SELATAN	41,172.00	-	1.00	41,173.00
4	KAB. LAMPUNG TIMUR	33,519.00	4.00	5.00	33,528.00
5	KAB. LAMPUNG TENGAH	60,841.00	4.00	3.00	60,848.00
6	KAB. LAMPUNG UTARA	28,655.00	1.00	-	28,656.00
7	KAB. WAY KANAN	58,001.00	-	3.00	58,004.00
8	KAB. TULANG	31,880.00	494.00	54.00	32,428.00

No	Kabupaten	Skala Usaha			
		Mikro (<2M)	Kecil (2-15M)	Menengah (15-50M)	Jumlah
	BAWANG				
9	KAB. PESAWARAN	43,021.00	278.00	31.00	43,330.00
10	KAB. PRINGSEWU	45,246.00	401.00	36.00	45,683.00
11	KAB. MESUJI	16,238.00	177.00	18.00	16,433.00
12	KAB. TULANG BAWANG BARAT	23,479.00	249.00	22.00	23,750.00
13	KAB. PESISIR BARAT	10,512.00	98.00	11.00	10,621.00
14	KOTA BANDAR LAMPUNG	30,934.00	2.00	4.00	30,940.00
15	KOTA METRO	18,917.00	305.00	48.00	19,270.00
	Jumlah	490,521.00	2,202.00	263.00	492,986.00

Sumber : SIDT Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023

Beberapa UKM unggulan di Provinsi Lampung disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.2.4. Data UMKM Unggulan di Provinsi Lampung

NO	NAMA UMKM	KOTA
KATEGORI FASHION DAN ACCESORIS		
1	Aan Ibrahim	Bandar Lampung
2	Nabbila (Murni)	Lampung Selatan
3	Alfira (Yusuf)	Lampung Selatan
4	Rahayu	Bandar Lampung
5	Tapis Helau (Raswan)	Bandar Lampung
6	Maryam (Bordir)	Lampung Selatan
7	Agung (Kaos Sakai)	Bandar Lampung
8	Poningsih (Sulam Usus)	Bandar Lampung
9	Nazruddin Habi (Sulam Usus)	Lampung Selatan
KATEGORI MAKANAN DAN MINUMAN		
1	Robbani	Pringsewu
2	Panda Tirai (Juanda)	Pringsewu
3	Gusti Snack (Elva)	Bandar Lampung
4	Mirhan (Kopi Luwak)	Bandar Lampung
5	Ali (Kopi Bubuk)	Bandar Lampung
6	Jims (Kopi Luak)	Lampung Barat
7	Harowahyudi (kripik pisang)	Metro
8	Lusi (Bandeng)	Bandar Lampung
9	Maya (Sambel Bawang)	Bandar Lampung
10	Windu (Kue Jajan Pasar)	Bandar Lampung
11	Nunung (Kremes, Dawet)	Bandar Lampung
12	Bayu (Lapis Legit)	Lampung Selatan
13	Iskandarsyah (Kopi Anjosia)	Bandar Lampung
14	Rido (Kopi Ridho)	Bandar Lampung
15	Nasrullah (Kopi Naire)	Bandar Lampung
16	Winarko (Susu Kambing)	Metro
KATEGORI BATIK		
1	Rumah Batik (Laila)	Bandar Lampung
2	Gabovira	Bandar Lampung
3	Ruwai Jurai (Zulkifli)	Bandar Lampung
4	Sulastri (Batik Tulis)	Bandar Lampung
KATEGORI FURNITURE		

NO	NAMA UMKM	KOTA
1	Jati Indah Jaya	Pesawaran
2	Samadi (kerajinan Batok kelapa)	Lampung Selatan
3	Sarkun (kerajinan lidi)	Lampung Selatan
4	Ukir Lampung	Bandar Lampung
KATEGORI HANDICRAFT		
1	Sambordir (Samsidar)	Bandar Lampung
2	Karya Indah Tapis	Bandar Lampung
3	Yulli Art	Bandar Lampung
4	Yanti ART (Yanti Parida)	Bandar Lampung
5	Doniintau (kerajinan kaligrafi)	Bandar Lampung
6	Ernita (Tapis)	Bandar Lampung
7	Desi Impiyani (Citra Tapis)	Bandar Lampung
KATEGORI SPA DAN HERBAL		
1	Rosa Delima (Madu)	Bandar Lampung
2	M. Hasby(VCO)	Bandar Lampung
3	Haeroni, STP (herbalist)	Bandar Lampung

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2023

2.3 Isu-Isu Penting Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu utama nasional terkait pengembangan koperasi dan UMKM antara lain:

- a) Adanya perbedaan definisi UMKM antar lembaga serta belum adanya basis data yang terintegrasi.
- b) Jumlah UMKM yang besar belum selaras dengan kontribusinya pada PDB
- c) Rendahnya UMKM yang terjalin dalam kemitraan, termasuk berjejaring dalam rantai nilai global (*global value chain*)
- d) Akses pembiayaan bagi UMKM masih rendah
- e) Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usahanya, termasuk digitalisasi
- f) Koperasi belum menjadi pilihan utama Kelembagaan Ekonomi Rakyat

Berdasarkan kondisi dan hasil analisis yang diuraikan sebelumnya dapat dilihat secara keseluruhan bahwa pelayanan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM merupakan permasalahan yang kompleks. Ketersediaan dan kemampuan aparatur pembina sangat berpengaruh dalam hal ini. Begitu banyaknya permasalahan Koperasi dan UKM yang perlu dibenahi mulai dari kemampuan pelaku Koperasi dan UKM, lemahnya akses UKM terhadap sumber daya produktif, kemampuan akses permodalan dan persaingan dengan badan usaha lainnya, iklim usaha yang belum kondusif dan kesetaraan gender dalam dukungan usaha dan modal kerja yang masih lebih memprioritaskan kaum pria dibanding kaum wanita. Sehingga dapat ditarik kesimpulan beberapa Isu

strategis di Provinsi Lampung yang perlu menjadi perhatian serius adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Kualitas SDM Koperasi dan UKM dengan Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Motivasi, Kreatifitas, inkubasi usaha dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam berwirausaha;
- b) Mengoptimalkan kelembagaan dan pengawasan bagi KUKM dengan meningkatkan pendampingan secara efektif dan efisien;
- c) Perkuatan akses pembiayaan bagi KUKM dengan Penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan *impact investment*, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan;
- d) Meningkatkan Produktifitas dan daya saing produk Koperasi dan UKM;
- e) Mengoptimalkan akses pemasaran bagi KUKM dengan meningkatkan promosi secara online dan offline misalnya seperti bekerjasama dengan *content creator social media*;
- f) Meningkatkan daya tarik investor untuk berinvestasi dengan meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder untuk pengembangan sarana prasarana;
- g) Mengoptimalkan dalam meningkatkan produktivitas Koperasi dan UKM, baik melalui perluasan jaringan produksi, pengembangan produk dan usaha, revitalisasi usaha maupun standarisasi produk;
- h) Meningkatkan kompetensi aparatur pembina Koperasi dan UKM dengan memberikan pelatihan berbasis kompetensi secara efektif dan efisien serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang perkantoran.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD 2025

Rancangan RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal. Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya

untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu perbedaan (pengurangan/penambahan) pagu antar sub kegiatan dengan karena menyesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Lampung. Selain itu adanya perubahan peraturan pada penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2025 ini berdasarkan **Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023** tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan sehingga ada penyesuaian nomenklatur kegiatan/sub kegiatan.

2.5 Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

Forum Perangkat Daerah Urusan Koperasi dan UKM merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2025. Forum Gabungan Perangkat Daerah merupakan wadah bersama antar para pelaku (*stakeholder*) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Provinsi. Usulan Perangkat Daerah serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh stakeholder dengan berpedoman kepada RPD Provinsi Lampung dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025-2026, tema dan prioritas pembangunan 2025 serta didasari reviu capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat target kinerja pada Renstra. Dari proses paduserasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2025 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik Renstra, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah. Proses pelaksanaan forum Gabungan Perangkat Daerah masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu,

sumber daya, banyaknya kegiatan serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Lampung bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan Provinsi Lampung. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.5. Tabel Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS USULAN		CATATAN PEMBAHASAN
					DITERIMA	DITOLAK	
1	NURUL IKHWAN	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Pengajuan Mesin Oven Vakum Frying untuk Pembuatan Keripik Nangka dan Mesin Sealer untuk UMKM	Jalan Margadantaran Desa Gayam Kec. Penengahan, Provinsi Lampung		V	Prog Kegiatan UMKM lebih ke peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan Promosi Pemasaran Produk, untuk bantuan alat belum ada alokasi anggaran
2	SITI RAHMA, SE	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Terbatas Nya Akses Dalam Pembiayaan	Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima. Kab Pesawaran, Provinsi Lampung		V	Prog Kegiatan UMKM lebih ke peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan Promosi Pemasaran Produk, untuk bantuan alat dan modal belum ada alokasi anggaran, jika pendampingan, pelatihan dan fasilitasi untuk akses keuangan masih dapat dilakukan
3	SITI RAHMA, SE	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Terbatas Nya Akses Dalam Pembiayaan	Dusun Padang Terang, Desa Padang Ratu, Kecamatan Gedong Tataan. Kab Pesawaran, Provinsi Lampung		V	Prog Kegiatan UMKM lebih ke peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan Promosi Pemasaran Produk, untuk bantuan alat dan modal belum ada alokasi anggaran, jika pendampingan, pelatihan dan fasilitasi untuk akses keuangan masih dapat dilakukan
4	SITI RAHMA, SE	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Terbatas Nya Akses Dalam Pembiayaan	Pekon Tegal Sari, Kecamatan Gading Rejo. Kab Pringsewu, Provinsi Lampung		V	Prog Kegiatan UMKM lebih ke peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan Promosi Pemasaran Produk, untuk bantuan alat dan modal belum ada alokasi anggaran, jika pendampingan, pelatihan dan fasilitasi untuk akses keuangan masih dapat dilakukan
5	SITI RAHMA, SE	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Terbatas Nya Akses Dalam Pembiayaan	Desa Tulung Agung, Kecamatan Gading Rejo. Kab Pringsewu, Provinsi Lampung		V	Prog Kegiatan UMKM lebih ke peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan Promosi Pemasaran Produk, untuk bantuan alat dan modal belum ada alokasi anggaran, jika pendampingan, pelatihan dan fasilitasi untuk akses keuangan masih dapat dilakukan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS USULAN		CATATAN PEMBAHASAN
					DITERIMA	DITOLAK	
6	NI KETUT DEWI NADI, ST	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	bantuan permodalan dagang untuk mengembangkan sektor umkm dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan	JALAN PENTAS TARI BALI KAMPUNG RAMA DEWA 1 KEC SEPUTIH RAMAN KAB LAMPUNG TENGAH, Provinsi Lampung		V	Prog Kegiatan UMKM lebih ke peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan Promosi Pemasaran Produk, untuk bantuan alat dan modal belum ada alokasi anggaran, jika pendampingan, pelatihan dan fasilitasi untuk akses keuangan masih dapat dilakukan
7	AR. SUPARNO, SE	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Banyak masyarakat miskin keluarga pra sejahtera yang memerlukan bantuan finansial dan pendidikan untuk mengembangkan sektor UMKM melalui bantuan PKH untuk modal usaha	Kelurahan Sukajawa, Gunung Sulah, Palapa, Rajabasa, susunan baru, way Halim Permai, labuhan ratu raya, Sukamenanti dan Penengahan, Provinsi Lampung		V	PKH kewenangan Dinas Sosial, tetapi jika sifatnya pendampingan dan pelatihan masih dapat dilakukan
8	Supriyanto, S.P, M.M	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	banyak ibu rumah tangga yang menganggur sehingga perlu adanya bantuan umkm pembuatan keripik singkong di dusun kalirejo 1 desa kalirejo	dusun kalirejo 1 desa kalirejo kecamatan negeri katon kabupaten pesawaran, Provinsi Lampung		V	Mengingat kegiatan ini masih ada di fase awal sehingga lebih baik dilaksanakan pelatihan terlebih dahulu, untuk bantuan alat dan modal belum ada alokasi anggaran, jika pendampingan, pelatihan dan fasilitasi untuk akses keuangan masih dapat dilakukan
9	Ir. H. MIDI ISWANTO, MH	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	banyaknya pengrajin rotan berupa kandang burung, perlengkapan dapur, mainan anak - anak, juga perlengkapan rumah tangga lainnya yang membutuhkan alat atau mesin untuk membantu agar lebih banyak benda dan barang yang dihasilkan	kampung nunggalrejo kec. punggur, Provinsi Lampung		V	Prog Kegiatan UMKM lebih ke peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan Promosi Pemasaran Produk, untuk bantuan alat dan modal belum ada alokasi anggaran, jika pendampingan, pelatihan dan fasilitasi untuk akses keuangan masih dapat dilakukan
10	MUHAMMAD KHADAFI AZWAR, SH	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Permohonan Bantuan Alat UMKM	Kecamatan Sukadana, Provinsi Lampung		V	Tidak ada kejelasan kebutuhan alat (untuk bantuan alat serta modal belum ada alokasi anggaran, jika pendampingan, pelatihan dan fasilitasi untuk akses keuangan masih dapat dilakukan)
11	VERI AGUSLI HTB, SE	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Banyak pelaku usaha kecil membutuhkan pelatihan dan bimbingan serta permodalan untuk meningkatkan produktivitas hasil usaha sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat	Kampung lebuah dalam , Provinsi Lampung	V		Pelatihan dapat diakomodir tetapi tidak dapat dilakukan di lokasi yang diminta dan jumlahnya juga akan mengikuti ketersediaan anggaran, akan diundang sebagai peserta di provinsi, sedangkan untuk permodalan disarankan melalui lembaga keuangan, akan di dampingi untuk arahan akses permodalan,

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS USULAN		CATATAN PEMBAHASAN
					DITERIMA	DITOLAK	
12	BUDI YUHANDA, SH, M.Kn	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Permohonan Bantuan Destinasi Wisata Desa	Desa Tri Tunggal Jaya Kec. Way Serdang dan Desa Muara Mas Kec. Mesuji Timur, Provinsi Lampung		V	Destinasi Pariwisata merupakan kewenangan Dinas Pariwisata
13	BUDI YUHANDA, SH, M.Kn	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Permohonan Bantuan Mesin UMKM berupa mesin giling ikan, alat cetak kerupuk dan mesin pembuat kapal motor	Desa Wiralaga II Kec. Mesuji, Provinsi Lampung		V	Prog Kegiatan UMKM lebih ke peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan Promosi Pemasaran Produk, untuk bantuan alat dan modal belum ada alokasi anggaran, jika pendampingan, pelatihan dan fasilitasi untuk akses keuangan masih dapat dilakukan
14	BUDI YUHANDA, SH, M.Kn	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Permohonan Bantuan Mesin dan Alat Transportasi BUMDES, berupa oven kopra dan mobil pengangkut (Truck)	Desa Muara Mas Kec. Mesuji Timur, Provinsi Lampung		V	BUMDES kewenangan Dinas PMD
15	VERI AGUSLI HTB, SE	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Banyak pelaku usaha kecil yang membutuhkan pelatihan dan bimbingan serta permodalan untuk meningkatkan produktivitas hasil usaha sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat	Kampung lebu dalam Menggala timur, Provinsi Lampung	V		Pelatihan dapat diakomodir tetapi tidak dapat dilakukan di lokus yang diminta dan jumlahnya juga akan mengikuti ketersediaan anggaran, akan diundang sebagai peserta di provinsi, sedangkan untuk permodalan disarankan melalui lembaga keuangan, akan di dampingi untuk arahan akses permodalan
16	VERI AGUSLI HTB, SE	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Banyak pelaku usaha UMKM di kabupaten tulang bawang, namun tidak tahu cara meningkatkan produktivitas produk dan penjualan sehingga membutuhkan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan produktivitas penjualan para pelaku usaha, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja	Kampung jaya Kahuripan dalam Menggala timur, Provinsi Lampung	V		Pelatihan dapat diakomodir tetapi tidak dapat dilakukan di lokus yang diminta dan jumlahnya juga akan mengikuti ketersediaan anggaran, akan diundang sebagai peserta di provinsi
17	VERI AGUSLI HTB, SE	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Banyak pelaku usaha UMKM di kabupaten tulang bawang, namun tidak tahu cara meningkatkan produktivitas produk dan penjualan sehingga membutuhkan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan produktivitas	Kampung bawang Tirto Mulyo Kecamatan Banjar baru, Provinsi Lampung	V		Pelatihan dapat diakomodir tetapi tidak dapat dilakukan di lokus yang diminta dan jumlahnya juga akan mengikuti ketersediaan anggaran, akan diundang sebagai peserta di provinsi

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS USULAN		CATATAN PEMBAHASAN
					DITERIMA	DITOLAK	
			penjualan para pelaku usaha, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja				
18	VERI AGUSLI HTB, SE	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Banyak pelaku usaha UMKM di kabupaten tulang bawang, namun tidak tahu cara meningkatkan produktivitas produk dan penjualan sehingga membutuhkan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan produktivitas penjualan para pelaku usaha, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja	Kampung cempaka dalam Menggala timur, Provinsi Lampung	V		Pelatihan dapat diakomodir tetapi tidak dapat dilakukan di lokus yang diminta dan jumlahnya juga akan mengikuti ketersediaan anggaran, akan diundang sebagai peserta di provinsi
19	VERI AGUSLI HTB, SE	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Banyak pelaku usaha UMKM di kabupaten tulang bawang, namun tidak tahu cara meningkatkan produktivitas produk dan penjualan sehingga membutuhkan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan produktivitas penjualan para pelaku usaha, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja	Kampung kibang Mulya jaya Lambu kibang , Provinsi Lampung	V		Pelatihan dapat diakomodir tetapi tidak dapat dilakukan di lokus yang diminta dan jumlahnya juga akan mengikuti ketersediaan anggaran, akan diundang sebagai peserta di provinsi
20	VERI AGUSLI HTB, SE	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Banyak pelaku usaha UMKM di kabupaten tulang bawang, namun tidak tahu cara meningkatkan produktivitas produk dan penjualan sehingga membutuhkan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan produktivitas penjualan para pelaku usaha, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja	Kampung bujung sarj marga, Provinsi Lampung	V		Pelatihan dapat diakomodir tetapi tidak dapat dilakukan di lokus yang diminta dan jumlahnya juga akan mengikuti ketersediaan anggaran, akan diundang sebagai peserta di provinsi

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS USULAN		CATATAN PEMBAHASAN
					DITERIMA	DITOLAK	
21	VERI AGUSLI HTB, SE	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Banyak pelaku usaha UMKM di kabupaten tulang bawang, namun tidak tahu cara meningkatkan produktivitas produk dan penjualan sehingga membutuhkan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan produktivitas penjualan para pelaku usaha, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja	Kampung bujung sari marga pagar dewa, Provinsi Lampung	V		Pelatihan dapat diakomodir tetapi tidak dapat dilakukan di lokus yang diminta dan jumlahnya juga akan mengikuti ketersediaan anggaran, akan diundang sebagai peserta di provinsi
22	VERI AGUSLI HTB, SE	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Banyak pelaku usaha UMKM di kabupaten tulang bawang, namun tidak tahu cara meningkatkan produktivitas produk dan penjualan sehingga membutuhkan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan produktivitas penjualan para pelaku usaha, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja	Kampung lesung Bhakti jaya Lambu kibang, Provinsi Lampung	V		Pelatihan dapat diakomodir tetapi tidak dapat dilakukan di lokus yang diminta dan jumlahnya juga akan mengikuti ketersediaan anggaran, akan diundang sebagai peserta di provinsi
23	VERI AGUSLI HTB, SE	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Banyak pelaku usaha UMKM di kabupaten tulang bawang, namun tidak tahu cara meningkatkan produktivitas produk dan penjualan sehingga membutuhkan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan produktivitas penjualan para pelaku usaha, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja	Kampung bujung dewa pagar dewa, Provinsi Lampung	V		Pelatihan dapat diakomodir tetapi tidak dapat dilakukan di lokus yang diminta dan jumlahnya juga akan mengikuti ketersediaan anggaran, akan diundang sebagai peserta di provinsi

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS USULAN		CATATAN PEMBAHASAN
					DITERIMA	DITOLAK	
24	VERI AGUSLI HTB, SE	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Banyak pelaku usaha UMKM di kabupaten tulang bawang, namun tidak tahu cara meningkatkan produktivitas produk dan penjualan sehingga membutuhkan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan produktivitas penjualan para pelaku usaha, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja	Kecamatan Banjar margo, Provinsi Lampung	V		Pelatihan dapat diakomodir tetapi tidak dapat dilakukan di lokus yang diminta dan jumlahnya juga akan mengikuti ketersediaan anggaran, akan diundang sebagai peserta di provinsi
25	Hi. GARINCA REZA PAHLEVI, S.I.Kom, MM	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Kelompok Kesenian Jaranan Turonggo Sakti yang berada di Desa Girimulyo, kecamatan Lampung timur merupakan suatu UMKM Positif yang dapat mengembangkan keterampilan serta budaya Lokal Kabupaten Lampung timur dengan melibatkan Putra-Putri daerah di daerah tersebut. Saat ini Kelompok tersebut sedang membutuhkan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk pengadaan alat- alat dan perlengkapan dalam Pementasan Seni Jaranan.	Desa Girimulyo Kecamatan Marga Sekampung, Provinsi Lampung		V	Bukan kewenangan Dinas Koperasi UMKM, sebaiknya diajukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
26	H. WATONI NOERDIN, SH, MH	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Diperlukan Pengadaan Pelatihan pembuatan tas guna mendukung UMKM kerajinan setempat	Desa Lumbirejo, Kecamatan Negeri Katon Provinsi Lampung	V		Pelatihan dapat diakomodir tetapi tidak dapat dilakukan di lokus yang diminta dan jumlahnya juga akan mengikuti ketersediaan anggaran, akan diundang sebagai peserta di provinsi
27	SITI RAHMA, SE	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Minimnya akses pekerjaan bagi perempuan telah mendorong mereka merangsak ke dalam jurang kemiskinan. Perlu adanya upaya pemberdayaan bagi mereka, khususnya pelaku UMKM yang sulit untuk naik kelas.	Jl. Cempedak, Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Lampung., Provinsi Lampung		V	Prog Kegiatan UMKM lebih ke peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan Promosi Pemasaran Produk, untuk bantuan alat dan modal belum ada alokasi anggaran, jika pendampingan, pelatihan dan fasilitasi untuk akses keuangan masih dapat dilakukan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS USULAN		CATATAN PEMBAHASAN
					DITERIMA	DITOLAK	
28	SITI RAHMA, SE	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Minimnya akses pekerjaan dan daya saing usaha kecil yang masih rendah mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan. Sehingga perlu adanya upaya pembinaan dan pengembangan usaha cetering untuk para perempuan terlebih usaha tersebut memiliki peluang yang besar.	Jl. Pala, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Prov. Lampung, Provinsi Lampung		V	Prog Kegiatan UMKM lebih ke peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan Promosi Pemasaran Produk, untuk bantuan alat dan modal belum ada alokasi anggaran, jika pendampingan, pelatihan dan fasilitasi untuk akses keuangan masih dapat dilakukan
29	SITI RAHMA, SE	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Kebutuhan akan konsumsi makanan makin tinggi tapi tidak diikuti pengembangan sektor kuliner lokal menjadi masalah serius. Akibatnya makanan lokal kian ditinggalkan dan digantikan oleh makanan-makanan dari luar. Sehingga perlu adanya pengembangan ekonomi melalui usaha cetering sebagai upaya mendorong peningkatan ekonomi dan kecukupan akan ketersediaan pasokan makanan lokal.	Jl. Selagai, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Prov. Lampung, Provinsi Lampung		V	Prog Kegiatan UMKM lebih ke peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan Promosi Pemasaran Produk, untuk bantuan alat dan modal belum ada alokasi anggaran, jika pendampingan, pelatihan dan fasilitasi untuk akses keuangan masih dapat dilakukan
30	SITI RAHMA, SE	Penurunan Kemiskinan dengan Mengembangkan Sektor UMKM	Minimnya pengembangan usaha kuliner mengakibatkan lepasnya peluang ekonomi daerah. Terlebih guna mengentaskan kemiskinan lokal. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengembangan usaha cetering guna mendorong peningkatan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.	Jl. Kunang, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Prov. Lampung, Provinsi Lampung		V	Prog Kegiatan UMKM lebih ke peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan Promosi Pemasaran Produk, untuk bantuan alat dan modal belum ada alokasi anggaran, jika pendampingan, pelatihan dan fasilitasi untuk akses keuangan masih dapat dilakukan

III. TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2025

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dengan telah terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden RI yang memiliki Visi “***Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045***” dengan misinya 8 Asta Cita meliputi :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan korupsi dan narkoba
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan , alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam implementasi VISI dan MISI Pemerintahan Presiden terpilih Masa Bhakti 2024-2029, terdapat 8 Program Prioritas yang akan dilaksanakan oleh Presiden terpilih Prabowo-Gibran. Hal tersebut merupakan raelisasi dari janji saat kampanye pada pelaksanaan Pilpres beberapa waktu yang lalu. Adapun 8 Program Prioritas tersebut yaitu :

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3. Melanjutkan dan menambah program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
4. Mencetak dan meningkatkan produktifitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional
5. Membangun Sekolah-sekolah yang terintergasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
6. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai (BLT) dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
7. Mendirikan badan penerimaan Negara dan peningkatan rasio penerimaan Negara terhadap produk domestic bruto (PDB) ke 23 %

8. Menaikan gaji ASN (Terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh) TNI/POLRI, dan pejabat negara

Sejalan dengan Visi dan Misi serta Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden diatas, maka pemerintah Provinsi Lampung telah merancang Tema Pembangunan Tahun 2025 yaitu **“Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan Serta Kualitas Pembangunan Manusia”**. Selanjutnya untuk mendorong percepatan pembangunan, pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Lampung telah merancang 7 (Tujuh) Prioritas Pembangunan dimana terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, masuk dalam mengemban Prioritas Pembangunan ke 4 dan ke 5. Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Reformasi birokrasi;
- 2) Peningkatan kualitas hidup SDM;
- 3) Pembangunan infrastruktur;
- 4) Penanggulangan kemiskinan;
- 5) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan;
- 6) Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis
- 7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Sesuai dengan RENSTRA Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Periode 2025-2026, ada 2 (dua) tujuan yang akan di capai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yaitu :

1. Meningkatnya Daya Saing Koperasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatnya Daya Saing UMKM untuk mendukung penurunan angka kemiskinan

Sedangkan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang akan di lakukan pada tahun 2025 yaitu:

1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas
2. Meningkatnya volume usaha koperasi
3. Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha

Selengkapnya indikator kinerja dan target sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.1. Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	36,66 %
			Pertumbuhan volume usaha koperasi	3,3 T
2	Meningkatnya Daya Saing UMKM untuk mendukung penurunan angka kemiskinan	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	8,76 %

Adapun Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan pendirian koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi
2. Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDMnya
3. Peningkatan kepatuhan koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya melalui pengawasan, pemeriksaan usaha serta penilaian kesehatan koperasinya
4. Peningkatan kualitas SDM koperasi melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi
5. Peningkatan akses pengembangan usaha bagi wirausaha baru baik dari sisi permodalan, pemasaran produk, serta pengembangan jaringan usaha
6. Peningkatan akses permodalan melalui penyaluran dana bergulir (LPDB)
7. Perluasan akses pasar melalui digitalisasi (pemasaran berbasis online)

IV.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

4.1 Program dan Kegiatan

Untuk menunjang pelaksanaan Tupoksi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 mendapat alokasi anggaran sejumlah total **Rp. 22.695.649.352,96** (*Dua puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua koma sembilan enam rupiah*). Penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2025 ini berdasarkan **Keppmendagri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023** Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dengan anggaran tersebut diatas direncanakan akan digunakan untuk menjalankan 8 (delapan) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan serta 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan. Berikut ini adalah rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 (Lampiran 4.1) :

➤ **Program Penunjang (1 program) terdiri dari :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 18.625.249.352,96 terdiri dari 8 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 151.735.000,00 Indikatornya adalah Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 90 Persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 117.766.000,00 indikatornya jumlah dokumen perencanaan sebanyak 10 dokumen

- b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 33.969.000,00 indikatornya jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 11 laporan
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 13.923.814.261,34 Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 90 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 13.998.814.261,34 indikatornya jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 187 orang/bulan
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp. 30.000.000,00 indikatornya Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 36 dokumen
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp. 15.000.000,00 indikatornya Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp. 30.000.000,00 indikatornya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 17 laporan
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp. 30.000.000,00. Indikatornya adalah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target 90 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 15.000.000,00 indikatornya Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan

- b) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 15.000.000,00 indikatornya Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 10.000.000,00. Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebanyak 90 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 10.000.000,00 indikatornya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 2 orang
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 670.700.800,00. Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebanyak 90 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 26.000.000,00 indikatornya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 20.000.000,00 indikatornya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 15.000.000,00 indikatornya Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 1 paket
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 20.000.000,00 indikatornya Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 1 paket
 - e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material Rp. 149.038.800,00 indikatornya Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan sebanyak 1 paket
 - f) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp. 25.680.000,00 indikatornya Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 12 laporan

- g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 414.982.000,00 indikatornya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 1.188.118.291,62. indikatornya adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 90 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Rp. 77.429.291,62 indikatornya Jumlah Paket Mebel yang Disediakan sebanyak 1 paket
- b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 1.060.689.000,00 indikatornya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sebanyak 80 unit
- c) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Rp. 50.000.000,00 indikatornya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan sebanyak 1 unit
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 1.989.000.000,00 indikatornya adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 90 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 256.600.000,00 indikatornya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 1.730.400.000,00 indikatornya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 586.881.000,00 indikatornya adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah sebesar 90 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 203.016.000,00 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 1 unit
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 193.465.000,00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 9 unit
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 15.000.000,00 indikatornya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 23 unit
- d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 175.400.000,00 indikatornya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit

➤ **Program Utama (7 Program) terdiri dari :**

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 600.000.000,00 terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 490.000.000,00 indikator Persentase koperasi simpan pinjam yang difasilitasi pembuatan izin usaha simpan pinjam sebesar 6,56 persen dengan sub kegiatan yaitu :
 - a) Sub kegiatan Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 490.000.000,00 dengan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan

Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam sebanyak 4 unit usaha

2. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 110.000.000,00 indikator Persentase koperasi simpan pinjam yang difasilitasi pembuatan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam sebesar 6,56 persen dengan sub kegiatannya yaitu :
 - a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. Rp. 110.000.000,00 dengan indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 4 unit usaha

2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 150.000.000,00 terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 75.000.000,00 dengan indikator kegiatannya Persentase koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan sebanyak 10,17 persen. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
 - a) Sub kegiatan Penguatan tatakelola kelembagaan koperasi Rp. 75.000.000,00 dengan indikatornya yaitu Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tatakelola kelembagaan koperasi sebanyak 30 unit usaha
2. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 75.000.000,- dengan indikator Persentase koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan

pinjam yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan sebanyak 32,79 persen. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

- a) Sub kegiatan Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 75.000.000,- indikatornya adalah Jumlah Koperasi Yang telah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan sebanyak 30 unit usaha

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Rp. 200.000.000,- terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 200.000.000,- indikatornya adalah Persentase koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam yang telah dilakukan penilaian kesehatan koperasi sebanyak 54,10 persen dengan 1 sub kegiatan yaitu :

- a) Sub kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Rp. 200.000.000,- indikatornya adalah Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 30 unit usaha

4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Rp. 816.000.000,00 Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan Yaitu :

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 816.000.000,00 indikatornya adalah Persentase SDM koperasi yang dilatih dan ditingkatkan kompetensi dan pengetahuannya sebesar 20,21 persen

- a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp. 816.000.000,00 indikatornya adalah Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian sebanyak 762 orang.

5. Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Rp. 725.000.000,00 terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 725.000.000,00 indikator kegiatannya adalah Persentase koperasi yang difasilitasi melalui pemberdayaan dan perlindungan koperasi sebanyak 6,78 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Rp. 175.000.000,00 indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha sebanyak 30 unit usaha
- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Rp. 275.000.000,00 indikatornya adalah Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya sebanyak 30 unit usaha
- c) Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Rp. 275.000.000,00 indikatornya Koperasi dengan keanggotaannya lintas daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan sebanyak 30 unit usaha

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Rp. 975.000.000,00 terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Rp. 975.000.000,00 indikator kegiatannya adalah Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan sebanyak 2,57 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Rp. 500.000.000,00 indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan dengan target 50 unit usaha
- b) Sub Kegiatan Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil Rp. 475.000.000,00 indikatornya Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi sebanyak 30 unit usaha

7. Program Pengembangan UMKM Rp. 568.400.000,00 terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

- 1. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Rp. 568.400.000,00 indikator kegiatannya adalah Persentase Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah sebanyak 3,77 persen. Sub kegiatannya sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Rp. 368.400.000,00 indikatornya Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi sebanyak 50 unit usaha
 - b) Sub Kegiatan Fasilitas Inkubator Usaha Kecil Rp. 200.000.000,00 indikatornya Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi sebanyak 25 unit usaha

V. PENUTUP

Penyusunan RENJA Tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ini di susun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi dan UKM. Keberhasilan pelaksanaan RENJA Tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung di tentukan oleh dukungan dari seluruh pegawai dan pelaku usaha Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung.

Dengan tersusunnya RENJA Tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung maka sasaran pembangunan di bidang Koperasi dan UKM ditandai dengan target capaian kinerja dalam tahun 2025 telah tergambar dan tercatat dengan jelas sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dapat di ukur dan dinilai keberhasilannya.

LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			PERKIRAAN MAJU 2026		KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			22,659,649,352.96	APBD		19,305,000,000.00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22,659,649,352.96	APBD		19,305,000,000.00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			22,659,649,352.96	APBD		19,305,000,000.00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintah daerah di OPD	90 %	18,625,249,352.96	APBD	90 %	12,435,000,000.00	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat	90 %	151,735,000.00	APBD	90 %	225,000,000.00	
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	117,766,000.00	APBD	12 Dokumen	175,000,000.00	
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	33,969,000.00	APBD	11 Laporan	50,000,000.00	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah	90 %	13,998,814,261.34	APBD	90 %	10,075,000,000.00	
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	187 Orang	13,923,814,261.34	APBD	73 Orang/	10,000,000,000.00	
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	30,000,000.00	APBD	36 Dokumen	30,000,000.00	
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15,000,000.00	APBD	1 Laporan	15,000,000.00	
2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	30,000,000.00	APBD	17 Laporan	30,000,000.00	
2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90 %	30,000,000.00	APBD	90 %	30,000,000.00	
2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15,000,000.00	APBD	2 Laporan	15,000,000.00	
2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15,000,000.00	APBD	2 Laporan	15,000,000.00	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	90 %	10,000,000.00	APBD	90 %	75,000,000.00	
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	10,000,000.00	APBD	2 Orang	25,000,000.00	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	90 %	670,700,800.00	APBD	90 %	555,000,000.00	
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26,000,000.00	APBD	1 Paket	20,000,000.00	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000.00	APBD	1 Paket	20,000,000.00	
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	APBD	1 Paket	15,000,000.00	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,000,000.00	APBD	1 Paket	20,000,000.00	
2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	-	APBD	1 Dokumen	15,000,000.00	
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	149,038,800.00	APBD	1 Paket	15,000,000.00	
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25,680,000.00	APBD	12 Laporan	50,000,000.00	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	414,982,000.00	APBD	12 Laporan	400,000,000.00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025		SUMBER DANA	PERKIRAAN MAJU 2026		KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	90 %	1,188,118,291.62	APBD	90 %	200,000,000.00	
2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	77,429,291.62	APBD	1 Paket	50,000,000.00	
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	1,060,689,000.00	APBD	10 Unit	100,000,000.00	
2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50,000,000.00	APBD	1 Unit	50,000,000.00	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	90 %	1,989,000,000.00	APBD	90 %	750,000,000.00	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	258,600,000.00	APBD	12 Laporan	200,000,000.00	
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,730,400,000.00	APBD	12 Laporan	550,000,000.00	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	90 %	586,881,000.00	APBD	90 %	525,000,000.00	
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	203,016,000.00	APBD	1 Unit	210,000,000.00	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	193,465,000.00	APBD	9 Unit	200,000,000.00	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	15,000,000.00	APBD	30 Unit	15,000,000.00	
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	175,400,000.00	APBD	1 Unit	100,000,000.00	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi simpan pinjam yang memiliki izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	32.79 %	600,000,000.00	APBD	36.07%	620,000,000.00	
2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi simpan pinjam yang difasilitasi pembuatan izin usaha simpan pinjam	6.56 %	490,000,000.00	APBD	6,56 %	260,000,000.00	
2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	4 Unit Usaha	490,000,000.00	APBD	4 Unit Usaha	260,000,000.00	
2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi simpan pinjam yang difasilitasi pembuatan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	6.56 %	110,000,000.00	APBD	6,56 %	360,000,000.00	
2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	4 Unit Usaha	110,000,000.00	APBD	4 Unit Usaha	360,000,000.00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang taat terhadap aturan perkoperasian sesuai dengan undang-undang yang berlaku	5,08 %	150,000,000.00	APBD	6.10%	300,000,000.00	
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	10.17 %	75,000,000.00	APBD	10,17 %	150,000,000.00	
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	30 Unit Usaha	75,000,000.00	APBD	30 Unit Usaha	150,000,000.00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025		SUMBER DANA	PERKIRAAN MAJU 2026		KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	32,79 %	75,000,000.00	APBD	32,79 %	150,000,000.00	
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30 Unit Usaha	75,000,000.00	APBD	30 Unit Usaha	150,000,000.00	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI	Persentase koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam koperasi yang memiliki kategori sehat	24,59 %	200,000,000.00	APBD	27.87%	200,000,000.00	
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam yang telah dilakukan penilaian kesehatan koperasi	54,10 %	200,000,000.00	APBD	54,10 %	200,000,000.00	
2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	200,000,000.00	APBD	30 Unit Usaha	200,000,000.00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang meningkat kompetensi dan pengetahuannya	3,22 %	816,000,000.00	APBD	6.44%	4,000,000,000.00	
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase SDM koperasi yang dilatih dan ditingkatkan kompetensi dan pengetahuannya	20,21 %	816,000,000.00	APBD	20,21 %	4,000,000,000.00	
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	762 Orang	816,000,000.00	APBD	600 Orang	4,000,000,000.00	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya	5.08 %	725,000,000.00	APBD	10.17%	650,000,000.00	
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang difasilitasi melalui pemberdayaan dan perlindungan koperasi	6.78 %	725,000,000.00	APBD	6,78 %	650,000,000.00	
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	30 Unit Usaha	175,000,000.00	APBD	20 Unit Usaha	150,000,000.00	
2.17.06.1.01.0008	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	30 Unit Usaha	275,000,000.00	APBD	20 Unit Usaha	150,000,000.00	
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan keanggotaannya lintas daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	30 Unit Usaha	275,000,000.00	APBD	20 Unit Usaha	150,000,000.00	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang meningkat daya saing usahanya melalui penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, kemudahan perizinan dan fasilitasi usaha	1.71 %	975,000,000.00	APBD	3.42%	400,000,000.00	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemberdayaan usaha kecil melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	2,57 %	975,000,000.00	APBD	2,57 %	400,000,000.00	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	50 Unit Usaha	500,000,000.00	APBD	15 Unit Usaha	200,000,000.00	
2.17.07.1.01.0012	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	30 Unit Usaha	475,000,000.00	APBD	30 Unit Usaha	100,000,000.00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025		SUMBER DANA	PERKIRAAN MAJU 2026		KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha kecil yang terfasilitasi dalam peningkatan tata kelola dan manajemen usaha menuju skala menengah	3,77 %	568,400,000.00	APBD	7,54%	700,000,000.00	
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	3,77 %	568,400,000.00	APBD	3,77 %	700,000,000.00	
2.17.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	368,400,000.00	APBD	80 Unit Usaha	450,000,000.00	
2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	25 Unit Usaha	200,000,000.00	APBD	30 Unit	250,000,000.00	
J U M L A H				22,659,649,352.96	APBD		19,305,000,000.00	

BANDAR LAMPUNG, DESEMBER 2024



KEPALA DINAS

Dr. SAMSURIJAL, M.M.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19670418 199203 1 003